



LAPORAN DELEGASI DPR RI "54th Parliamentary Conference on WTO (PCWTO)"

Brussels, Belgium – 20 Februari 2025



THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025



**LAPORAN
DELEGASI DPR RI**

**"54TH
PARLIAMENTARY
CONFERENCE ON
WTO (PC WTO)"**

Brussels, Belgium
20 Februari 2025

Laporan Delegasi DPR RI
Sidang 54th Parliamentary Conference on WTO (PC WTO)
20 Februari 2025 - Brussels, Belgium

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO) merupakan proyek kerja sama antara *European Parliament (EU)* dengan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*. Konferensi ini diselenggarakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada parlemen sebagai perwakilan rakyat.

Konferensi Parlemen di WTO diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Tingkat Menteri WTO. Dimana, konferensi ini mempertemukan anggota parlemen dari seluruh dunia untuk membahas masalah perdagangan internasional, menerima informasi seputar isu-isu perdagangan global dari para pemimpin WTO. Parlemen juga memberikan masukan ke WTO terkait isu-isu perdagangan internasional yang berdampak langsung ke masyarakat dan saling bertukar pandangan.



Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Bapak Ravindra Airlanda menghadiri Pertemuan PCWTO ke-54 di Brussels. Dok: BKSAP

Pertemuan PC WTO yang ke-54 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 bertempat di Gedung Parlemen Eropa di Brussels, Belgia. Sebagai salah satu parlemen yang diundang hadir di konferensi tersebut, DPR RI sangat aktif hadir dan memberi masukan di tiap pertemuan PC WTO.

Pertemuan yang ke-54 membahas mengenai perkembangan terkini di WTO, termasuk persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM 14) yang rencananya akan diselenggarakan di Kamerun. Selain itu para delegasi yang hadir juga akan berukar pandangan mengenai isu-isu perdagangan internasional yang belum final atau belum mencapai kesepakatan penuh dari para anggota WTO dari KTM 13 di Abu Dhabi, juga mengenai isu-isu strategis lainnya terkait WTO.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI ke *Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO)* berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025

C. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi BKSAP DPR RI, yang menghadiri *Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO)* di Brussels, Belgia, 20 Februari 2025 terdiri dari:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Ravindra Airlangga	F. Golkar	Wakil Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2.	M. Husein Fadlulloh	F. Gerindra	Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi
3.	Irham Jafar Lan Putra	F. PAN	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Adapun maksud dan tujuan pengiriman delegasi DPR RI adalah:

1. Menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil parlemen sebagai strategi dalam mempromosikan perdagangan Indonesia.
2. Menyampaikan implementasi yang dapat Indonesia lakukan, terutama parlemen, mengenai kesepakatan, sekaligus tantangan serta potensi-potensi ratifikasi dari kesepakatan yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara.



3. Memanfaatkan Sidang ke-54 PCWTO ini untuk memperkuat dialog multilateral DPR RI dengan berbagai lembaga internasional dan negara-negara sahabat.

E. Misi Delegasi

Adapun misi delegasi BKSAP DPR RI menghadiri agenda tersebut adalah:

1. Berkontribusi aktif untuk menyoroti langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan parlemen untuk mencapai tujuan-tujuan dalam meningkatkan tata kelola bidang perdagangan.
2. Memperkuat peran parlemen dan memanfaatkan forum Sidang *Steering Committee* ke-45 PCWTO sebagai wadah, peluang kerja sama serta memperkuat peran serta DPR RI di kancah internasional.

F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri *Parliamentary Conference on WTO/PC WTO*. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi dan dilanjutkan dengan menyiapkan bahan dan poin intervensi yang sebelumnya sudah mendapat masukan dari Kementerian Luar Negeri RI.

II. ISI LAPORAN

A. Agenda Sidang

Adapun agenda 54th Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO) sebagai berikut:

WAKTU	AGENDA
20 February 2025	
11:00-12:30	Update on recent developments at the WTO, including preparations for the 14th Ministerial Conference (MC14) in Cameroon
12:45-14:15	LUNCH (offered by the European Parliament)
14:30-16:30	1. Adoption of the agenda. 2. Update on the recent and future activities of the Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO) <i>The members of the Steering Committee will be apprised of the recent activities of the PCWTO, including the national capacity building workshop for members of parliaments and their staff held in Abidjan, Côte d'Ivoire, on 5-6 December 2024.</i> <i>With regard to future activities, they will discuss the potential organization of regional and national workshops.</i> <i>In the same vein, the members of the Steering Committee will exchange views on how to make best use of the opportunities offered by the 2025 WTO Public Forum (autumn 2025), including a possible theme for a parliamentary panel.</i> <i>In addition, following the decision of the General Council of the WTO, the next WTO Ministerial Conference (MC14) will take place from 26 to 29 March 2026 in Cameroon. Steering Committee Members will decide whether they will hold a Parliamentary Conference on the WTO in conjunction with the Ministerial Conference and if so, will consider the format of that meeting based on proposals from the Secretariat.</i>

	3. Questions relating to partial rotation of the Steering Committee membership <i>In September 2011, the Steering Committee approved a number of principles pertaining to the organization of partial rotation of its membership. The next round of rotation being due to take place on 20 February 2025, the Committee will be called on to consider a proposal prepared by the IPU and the European Parliament in conformity with the Rules of Procedure of the Parliamentary Conference on the WTO.</i> 4. A comprehensive approach for e-commerce in the WTO <i>The members of the Steering Committee will discuss the state of play of the plurilateral agreement on e-commerce, the ongoing preparations for the work programme on e-commerce, and the future of the e-commerce moratorium, bringing together the various strands of activities in a comprehensive approach.</i> 5. Any other business 6. Date and venue of the next meeting of the Steering Committee
--	--

B. Jalannya Persidangan

Para anggota Komite Pengarah berpartisipasi dalam pertukaran pandangan Komite Perdagangan Internasional dengan Wakil Direktur Jenderal WTO, Angela Ellard¹, mengenai tantangan-tantangan WTO. Debat tersebut berfokus pada prioritas-prioritas WTO, seperti reformasi sistem penyelesaian sengketa, dimensi pembangunan WTO, termasuk Perjanjian Fasilitasi Investasi untuk Pembangunan dan reformasi pertanian serta langkah-langkah fasilitasi fitosanitari, perjanjian subsidi perikanan, dan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan plurilateral mengenai perdagangan elektronik. Dalam diskusi mengenai tantangan-tantangan perdagangan global, para anggota sepakat bahwa para anggota parlemen perlu bersatu padu mendukung sistem perdagangan multilateral dan WTO.

¹ Wakil Direktur WTO Angela Ellard hadir mewakili Direktur Jenderal WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala yang semula direncanakan hadir, namun berhalangan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Pada sesi khusus yang membahas mengenai e-commerce, sebuah Panel khusus bertema "Pendekatan komprehensif untuk e-commerce di WTO" yang melibatkan para ahli dari WTO, Komisi Eropa, dan pelaku bisnis internasional membahas beberapa pertanyaan, termasuk masa depan perjanjian plurilateral mengenai e-commerce, Program Kerja E-Commerce, peran anggota parlemen dalam proses pengembangan aturan baru, dan tantangan dalam menyeimbangkan liberalisasi perdagangan dengan kepentingan kebijakan legislator dan regulator yang sah. Para anggota parlemen juga membahas kegiatan masa depan, termasuk Forum Publik WTO, Konferensi Parlemen berikutnya tentang WTO, kegiatan pengembangan kapasitas, dan keanggotaan baru Komite Pengarah.



Perwakilan Parlemen Uni Eropa saat memimpin 54th Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO). Dok: BKSAP

Pada sesi khusus mengenai e-commerce, perwakilan Parlemen Eropa yang hadir mempertanyakan mengenai posisi Indonesia terkait isu e-commerce dan transmisi elektronik, serta terkait dengan isu moratorium. Sebagaimana diketahui, moratorium bea masuk untuk transmisi elektronik telah diterapkan WTO sejak tahun 1998, dan terus diperpanjang pada setiap KTM WTO. Moratorium tersebut melarang anggota WTO untuk memungut bea masuk terhadap transaksi elektronik. Namun demikian, masih belum ada kesepakatan diantara anggota WTO mengenai lingkup, definisi dan dampak dari moratorium tersebut.

Sebagian besar anggota WTO mendukung moratorium ataupun menginginkan agar moratorium bea masuk untuk transmisi elektronik dibuat berlaku permanen. OECD telah berulang kali mengeluarkan dokumen penelitian mengenai dampak negatif penerapan bea masuk bagi transmisi elektronik. G7

telah mengeluarkan Leaders Communique yang meminta agar terdapat solusi permanen atas pelarangan bea masuk bagi transmisi elektronik. Di sisi lain, sejumlah negara juga secara terbuka mendukung penghentian moratorium, seperti Indonesia, India, Afrika Selatan dan Pakistan.

Sebagai informasi, Indonesia menjadi anggota WTO terakhir yang menghambat keputusan mengenai perpanjangan moratorium. Indonesia pada akhirnya menyetujui perpanjangan kembali moratorium hingga KTM ke-14 atau pada tanggal 31 Maret 2026. Negara-negara proponen perpanjangan moratorium masih melihat celah untuk dapat kembali memperpanjang ataupun mendorong agar moratorium diberlakukan permanen melalui pengambilan keputusan pada pertemuan General Council WTO, Keputusan anggota WTO untuk membahas kembali isu moratorium pada KTM ke-14 WTO, serta perundingan plurilateral *Joint Initiative on e-commerce*.



Perwakilan Parlemen Uni Eropa saat memimpin 54th *Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO)*. Dok: BKSAP

Pembahasan isu e-commerce di WTO dilakukan melalui pembentukan sebuah kerangka kerja yang disebut Work Programme on Electronic Commerce (WPEC) dibawah Council for Trade in Services (CTS). Dedicated Discussion on e-commerce yang merupakan implementasi dari WPEC diadakan pertama kali pada bulan November 2022 sebagai mandat dari General Council (GC) WTO. GC dimandatkan untuk menghidupkan kembali kegiatan dibawah program tersebut guna meningkatkan partisipasi negara berkembang dan kurang berkembang atau LDCs dalam perdagangan digital.

Bagi Indonesia, penerapan moratorium bea masuk untuk transmisi elektronik dapat diterapkan namun tidak termasuk pada konten/barang digital yang

ditransmisikan secara elektronik. Posisi Indonesia pada isu ini disampaikan oleh delegasi yang hadir pada pertemuan tersebut. Terkait isu transmisi elektronik, Wakil Ketua BKSAP dari fraksi partai Golkar Ravindra Airlangga menyampaikan bahwa penerapan bea masuk terhadap transmisi elektronik bukan hanya untuk mengejar pendapatan negara, tetapi juga agar tercipta ruang kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

Dalam konteks Indonesia, penerapan bea masuk terhadap transmisi elektronik tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan, khususnya Undang-Undang Kepabeanan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai implementasinya. Lebih jauh, hal tersebut juga merupakan perwujudan dari *right to regulate* dan *right to development* anggota WTO, menghentikan diskriminasi terhadap perdagangan digital *vis-à-vis* perdagangan konvensional, serta mengatasi kesenjangan digital/*digital divide*.

Penerapan bea masuk untuk transmisi elektronik juga dapat dimanfaatkan untuk rekam statistic data perdagangan digital sekaligus mempromosikan pertumbuhan UMKM lokal.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI M. Husein Fadlulloh saat menyampaikan intervensi pada 54th *Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO)*. Dok: BKSAP

Sedangkan untuk isu e-commerce, Wakil Ketua BKSAP dari fraksi partai Gerindra Muhammad Husein Fadlulloh menyampaikan posisi dasar Indonesia di WTO terkait isu tersebut, bahwa e-commerce harus menjadi mesin pertumbuhan inklusif yang dapat memberdayakan semua negara anggota, khususnya negara berkembang dan kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs). Indonesia juga mendorong upaya kolektif untuk mengatasi kesenjangan digital melalui peningkatan kapasitas, transfer teknologi, serta

penyediaan akses internet yang terjangkau bagi semua. Indonesia juga mendorong agar WPEC mengakomodasi kepentingan semua anggota, termasuk negara berkembang, dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional mereka. WPEC juga didorong untuk dapat menghasilkan keluaran konkret yang bermanfaat bagi semua anggota pada KTM ke-14 nanti.

Diskusi dalam pertemuan ke-54 PC WTO ini tidak menghasilkan dokumen politik apapun, namun hal-hal yang disampaikan oleh para pihak pada pertemuan dicatat untuk kemudian dapat dibahas lebih lanjut pada pertemuan PC WTO berikutnya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa: Para peserta mendiskusikan kemajuan dan tantangan dalam memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO yang berfungsi penuh, yang terhenti sejak 2019. Pembahasan ini penting mengingat sampai dengan saat ini belum ada sistem penyelesaian sengketa yang berjalan optimal di WTO. Indonesia sendiri berkepentingan untuk sistem penyelesaian sengketa tersebut bisa berjalan normal kembali, terutama terkait dengan isu sengketa dagang dengan Uni Eropa.
2. Dimensi Pembangunan: Pembahasan mencakup peran WTO dalam pembangunan, termasuk Perjanjian Fasilitas Investasi untuk Pembangunan dan penerapan perlakuan khusus dan berbeda (S&DT) untuk negara-negara berkembang dan LDC.
3. Pertanian dan Subsidi Perikanan: Negosiasi mengenai reformasi pertanian dan implementasi perjanjian subsidi perikanan juga menjadi agenda utama. Untuk Indonesia, Kepentingan utama Indonesia pada isu pertanian dan subsidi perikanan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berakar pada perlindungan petani dan nelayan skala kecil, ketahanan pangan nasional, dan memastikan perlakuan khusus dan berbeda (S&DT) sebagai negara berkembang. Sedangkan sampai dengan saat ini, perkembangan isu pertanian dan subsidi perikanan di WTO saat ini menunjukkan adanya kemandekan dalam negosiasi pertanian dan kemajuan parsial dalam isu perikanan (perjanjian pertama telah berlaku), di mana kepentingan Indonesia masih terpusat pada perlindungan petani dan nelayan skala kecil.
4. Perdagangan Digital: Kolaborasi menuju perjanjian plurilateral tentang e-commerce dan perpanjangan moratorium bea masuk transmisi elektronik dibahas. Terkait dengan hal ini, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam perdagangan digital, mengingat penetrasi internet yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Namun, posisinya di WTO didorong oleh prinsip kehati-hatian dan perlindungan ruang kebijakan domestik. Diskusi mengenai hal ini cukup alot dan banyak anggota parlemen Eropa yang mendesak pendirian Indonesia. Namun, delegasi BKSAP tetap fokus pada kepentingan nasional yakni, pada posisi defensif dalam negosiasi perdagangan digital di WTO, menolak komitmen yang

terlalu mengikat dalam JSI (Joint Statement Initiative on Electronic Commerce) dan menuntut analisis komprehensif mengenai dampak moratorium bea masuk terhadap pembangunan nasional.

5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para anggota parlemen sepakat bahwa mereka perlu bersatu dalam mendukung sistem perdagangan multilateral dan memastikan transparansi dan akuntabilitas WTO. Namun, Delegasi BKSAP tetap konsisten dalam menyuarakan kepentingan nasional Indonesia, khususnya yang terkait dengan Pertanian dan Subsidi Perikanan serta Perdagangan Digital.

B. Saran

1. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP dapat memperkuat koordinasi dan kepemimpinan Indonesia dalam kelompok parlemen G-33 untuk menegosiasikan solusi permanen bagi Public Stockholding (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM). Konsistensi dalam menyuarakan perlunya Special and Differential Treatment (S&DT) adalah kunci untuk melindungi petani skala kecil dan ketahanan pangan nasional.
2. BKSAP dapat mendorong Komisi terkait di DPR RI agar meminta Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan sikap defensif yang hati-hati terhadap Joint Statement Initiative (JSI) E-commerce dan moratorium bea masuk transmisi elektronik. Disamping itu, Indonesia perlu secara aktif memobilisasi dukungan dari negara berkembang lain yang memiliki kekhawatiran serupa mengenai hilangnya pendapatan negara dan kedaulatan regulasi.
3. Menggunakan forum-forum seperti PC WTO Brussels untuk mendesak negara-negara anggota agar segera memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO yang berfungsi penuh dan mengikat. Ini penting bagi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dagang secara adil, seperti yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa.
4. BKSAP harus terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian terkait lainnya. Memanfaatkan forum parlemen internasional untuk menggalang dukungan politik dan menekan pemerintah eksekutif di negara lain, melalui parlemen mereka, agar mempertimbangkan kepentingan pembangunan Indonesia.
5. Mendukung reformasi tata kelola WTO yang meningkatkan transparansi dan memastikan suara negara berkembang didengar secara setara dalam proses pengambilan keputusan.
6. Laporan ini agar di informasikan ke Komisi-Komisi terkait di DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan terkait kebijakan luar negeri dan kebijakan perdagangan Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Rangkaian kegiatan dan partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI pada *Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO)* yang berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 di Brussels, Belgia menggunakan mata anggaran MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC.001.051.C.524211 sebesar Rp654.558.400,- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

B. Keterangan dan Lampiran

1. Undangan, Agenda dan Information Note
2. Foto dokumentasi ([link](#))
3. Link publikasi
 - a. [BKSAP DPR RI di Konferensi PCWTO: Perkuat Peran Indonesia di WTO!](#)

C. Ucapan Terimakasih

Atas nama Delegasi BKSAP DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan *Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO)* yang berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 di Brussels, Belgia.

Semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perdagangan dunia di masa yang akan datang.

D. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi BKSAP DPR RI pada *Parliamentary Conference on the World Trade Organisation (PCWTO)* yang berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 di Brussels, Belgia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2025
a.n. Delegasi BKSAP DPR-RI,
Ketua Delegasi

Ravindra Airlangga



LAMPIRAN



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Office of the Secretary General

T +41 22 919 41 50
F +41 22 919 41 60
E postbox@ipu.org
www.ipu.org

Chemin du Pommier 5
Case postale 330
1218 Le Grand-Saconnex
Geneva – Switzerland

Dr. Puan Maharani
Speaker of the House of Representatives
Indonesian Inter-Parliamentary Group
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto
JAKARTA PUSAT 10270
Indonesia

Geneva, 6 February 2025

Dear Madam Speaker,

The Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO) will hold its 54th session on 20 February 2025 on the premises of the European Parliament in Brussels. Dr. Mardani Ali Sera, Chair of interparliamentary cooperation serves as the representative of the House of Representatives of Indonesia on this Committee.

I would appreciate your facilitation for his participation at the meeting so that the discussions can be enriched by his contributions and the views of your Parliament. The provisional agenda of the meeting is attached, for your information.

I thank you in advance for your support for this Committee's activities.

Yours sincerely,

Martin Chungong
Secretary General

cc: Biro Kerja Sama Antar Parlemen biro_ksap@dpr.go.id

PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO

Organized jointly by the Inter-Parliamentary Union and the European Parliament

Fifty-fourth session of the Steering Committee

20 February 2025, 11:00-16:30

European Parliament, Brussels

PROVISIONAL AGENDA

11:00-12:30 (room to be confirmed)

Update on recent developments at the WTO, including preparations for the 14th Ministerial Conference (MC14) in Cameroon

Members of the Steering Committee are invited to observe the European Parliament Committee on International Trade (INTA) in the European Parliament from 11:00 to 12:30.

The session will start with an exchange of views with WTO Director-General Dr. Ngozi Okonjo-Iweala (tbc) on recent developments at the WTO.

The meeting is open to the public. The members of the Steering Committee are welcome to contribute to the question-and-answer session.

12:45-14:15 – LUNCH (offered by the European Parliament)

14:30-16:30 (room to be confirmed)

- 1. Adoption of the agenda**
- 2. Update on the recent and future activities of the Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO)**

The members of the Steering Committee will be apprised of the recent activities of the PCWTO, including the national capacity building workshop for members of parliaments and their staff held in Abidjan, Côte d'Ivoire, on 5-6 December 2024.

With regard to future activities, they will discuss the potential organization of regional and national workshops.

In the same vein, the members of the Steering Committee will exchange views on how to make best use of the opportunities offered by the 2025 WTO Public Forum (autumn 2025), including a possible theme for a parliamentary panel.

In addition, following the decision of the General Council of the WTO, the next WTO Ministerial Conference (MC14) will take place from 26 to 29 March 2026 in Cameroon. Steering Committee Members will decide whether they will hold a Parliamentary Conference on the WTO in conjunction with the Ministerial Conference and if so, will consider the format of that meeting based on proposals from the Secretariat.

3. Questions relating to partial rotation of the Steering Committee membership

In September 2011, the Steering Committee approved a number of principles pertaining to the organization of partial rotation of its membership. The next round of rotation being due to take place on 20 February 2025, the Committee will be called on to consider a proposal prepared by the IPU and the European Parliament in conformity with the Rules of Procedure of the Parliamentary Conference on the WTO.

4. A comprehensive approach for e-commerce in the WTO

The members of the Steering Committee will discuss the state of play of the plurilateral agreement on e-commerce, the ongoing preparations for the work programme on e-commerce, and the future of the e-commerce moratorium, bringing together the various strands of activities in a comprehensive approach.

5. Any other business

6. Date and venue of the next meeting of the Steering Committee

**54th SESSION OF THE STEERING COMMITTEE OF THE
PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE WTO**

Brussels, 20 February 2025

PRACTICAL INFORMATION NOTE

1. Date and venue

The 54th session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO will take place on **Thursday, 20 February 2025**, on the premises of the European Parliament (Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium).

The **core segment of the session**, when the Steering Committee will be working *in camera* in accordance with its own regular agenda (attached), will take place **in the afternoon of Thursday, 20 February, from 14:30 to 16:30** (room number to be announced).

In the **morning of 20 February, from 11:00 to 12:30**, members of the Steering Committee are invited to join the European Parliament's Committee on International Trade (INTA) in room (tbc), for exchanges of views with the WTO Director-General or a Deputy Director-General on recent events at the WTO and preparations for the next Ministerial Conference. The meeting is part of the regular work programme of INTA and is open to the public. The members of the Steering Committee are welcome to contribute to the question-and-answer exchange.

A luncheon will be offered to all participants in the 54th session of the Steering Committee. It will be served at 12:45 on the premises of the European Parliament.

2. Registration

In order to access the premises of the European Parliament, all delegates will need an ID badge. Please **register by 10 February at the latest at this link: [Registration link](#). After this date the link will no longer be active.**

If possible, please specify when registering whether you plan to attend the full day or only parts of it.

Upon receipt of the duly completed registration, the European Parliament's Security Services will issue individual badges for each participant. **Please note that each registered participant must bring the same passport as indicated in the registration form as it will be used for printing an access badge.** For security reasons, delegates are requested to wear their badges at all times.

The meeting point for printing and collecting the badges will be located at the STATION EUROPE (light blue coloured building on the map enclosed, entrance from AGORA SIMONE VEIL side) on Thursday, 20 February from 09:30 to 11:00 for those arriving in the morning and from 13:30 to 14:00 for delegates coming only for the afternoon part.

3. Interpretation

Simultaneous interpretation will be provided in English, French and Spanish. Official written documentation of the session will be available in English and French only.

4. Hotel accommodation

Delegates are responsible for their own hotel bookings and expenses. In view of the high occupancy rate of hotels in Brussels, the European Parliament's Travel Office recommends the following hotels located nearby:

- **Renaissance Brussels Hotel** (<http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/brubr-renaissance-brussels-hotel/>)
- **Aloft Hotel Brussels** (<http://www.aloftbrussels.com/aloft-rooms>)
- **Radisson RED Brussels** (<https://www.radissonred.com/brussels/>)
- **NH hotel Brussels City** (<https://www.nh-hotels.com/en/hotels/brussels>)

5. Visas

Attention is drawn to the strict provisions regarding entry into the European Union. Delegates requiring an entry visa to Belgium, which is part of the Schengen Area, must obtain their visas from the Belgian consulate or diplomatic mission in their country of residence.

6. Local transport

The European Parliament is located within walking distance of the Royal Palace and very close to the Place du Luxembourg and the Luxembourg Train Station.

The public transportation network in Brussels is extensive and easily accessible. The metro, trams and buses operate between. 06:00 and 23:00.

The underground network comprises four lines: 1, 2, 5 and 6. Line 2 (orange) and Line 6 (blue) serve the "Trone" stop, which is the closest metro stop to reach the European Parliament on foot (taking rue du Luxembourg).

The Number 12 bus goes to the European Parliament from the Airport, No. 38 from Central Station and the City Centre, and Nos. 95 from Grand-Place city centre (stop Luxembourg) and 71 from De Brouckere.

For further information about the public transportation system, please consult <http://www.stib.be>.

7. Contact at the European Parliament:

Mr. Leon Peijnenburg - Administrator

Committee on International Trade

Phone: +32 2 28 32345

e-mail: leon.peijnenburg@europarl.europa.eu

Ms. Diana Labulyte - Assistant

Committee on International Trade

Phone: +32 2 28 31071

e-mail: diana.labulyte@europarl.europa.eu





@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id